



SKPD Diingatkan Tindaklanjuti Hasil Temuan

(Kalbar), Christiandy Sanjaya, dalam sambutannya, pada kesempatan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat, yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Rabu (12/2). Ditambahkan Wagub, agenda yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar ini, merupakan salah satu potret dari keberhasilan maupun kelemahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, dalam melaksanakan program dan misi sebagaimana yang dicita-citakan. Wagub juga menambahkan, di mana beberapa upaya telah dilaksanakan, dalam rangka tindak lanjut LHP BPK RI dimaksud, dengan membuat rencana aksinya, walau bersumber dari



JUMUDI GADING/HUMAS SETDA
TERIMA LAPORAN; Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II dari kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio, di Aua Kantor BPK RI Perwakilan Pontianak.

PONTIANAK - Setiap pimpinan *satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai Permerpan Nomor 9 Tahun 2009 pada point f. menyebutkan, setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban, untuk menindaklanjuti rekomendasi*

Pra LHP. Dia memisalkan, seperti menginstruksikan kepada para pimpinan SKPD untuk segera menindaklanjuti, serta mengingatkan kembali, baik secara lisan maupun tertulis, dalam merespons perkembangan TLHP dan secara kontinyu, selalu mengikuti perkembangan TLHP BPK RI dan temuan APIP lainnya, termasuk temuan yang berpotensi merugikan daerah/negara. Wagub juga berpesan, agar kiranya kegiatan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, mampu memberikan motivasi yang lebih, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD ke arah yang lebih baik lagi. "Saya melihat Kabupaten Kayong Utara, menerima hasil laporan bukannya tipis. Itu berarti sedikit juga temuan di daerah merdeka, untuk itu kinerja laporan harus ditingkatkan," seloroh Wagub sembari memandangi Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid yang duduk satu meja

Pemerintah Daerah, yang akan segera dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Untuk itu dia berharap, agar temuan yang ada, dapat segera ditindaklanjuti, di mana hal ini mengingat demi baiknya tata kelola keuangan daerah, serta demi menghindari *financial distress* di masa yang akan datang. Karena, katanya lagi, kegagalan dalam pengelolaan keuangan daerah, bisa mempengaruhi terhadap penilaian BPK RI, atas penyajian keuangan pemerintah daerah.

Dalam penyerahan LHP ini, selain Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, juga hadir ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Ibrahim Dahlan. Keduanya menandatangani berkas penerimaan LHP yang diserahkan BPK RI. Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menuturkan jika dirinya akan terus berkomitmen meningkatkan laporan Pemerintah Kayong Utara guna kemajuan daerah ini. *(mah/Humas)*

Makota Kayong
HOTEL
SUKADANA
MEMBER OF THE SBB

Reservasi dan Informasi :
(0534) 772777

Jl. Jangs Lila's Sukadana
Kedua Belah, Karang Lilara, Kalimantan Barat
Website : www.makotakayonghotel.com

PONTIANAK SALES OFFICE
Grand Makota Hotel Pontianak
Jl. Sidas No. 8 Pontianak
(0561) 736022 / Fax. (0561) 736200
Website : www.grandmakotahotel.com